

MODEL PENYEBARAN RELATIF SEKTOR PERTANIAN, PERDAGANGAN DAN INDUSTRI PENGOLAHAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Siska Amelia¹, Guswandi²

¹Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Krisnadwipayana, Indonesia,

²Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Krisnadwipayana, Indonesia
[*amelie93028@gmail.com](mailto:amelie93028@gmail.com), guswandi_virgo@yahoo.com

Abstrak

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, peningkatan daya saing wilayah serta mengurangi ketimpangan antar wilayah, maka diperlukan pemerataan distribusi kegiatan-kegiatan perekonomian wilayah. Selain itu juga dalam upaya pengembangan wilayah diperlukan penekanan pada sektor basis yang dapat memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat penyebaran secara relatif kegiatan-kegiatan perekonomian yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Metode yang digunakan adalah dengan menghitung Localization Index. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa total PDRB berdasarkan harga berlaku setiap kabupaten/kota, serta PDRB per sektor di masing-masing kabupaten/kota. Sektor yang diamati dalam penelitian ini adalah sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor perdagangan besar dan eceran. Hasil analisis memperlihatkan tingkat penyebaran relatif kegiatan-kegiatan ekonomi di Sumatera Barat terdistribusi merata dan seimbang antar wilayah. Sektor yang memiliki tingkat pemerataan kegiatan ekonomi tertinggi adalah sektor perdagangan besar dan eceran, diikuti oleh sektor industri pengolahan dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Kata kunci: ekonomi wilayah; pengembangan wilayah; *Localization Index*

Abstract

In an effort to improve people's welfare, alleviate poverty, increase regional competitiveness and reduce inequalities between regions, it is need to have an even distribution of regional economic activities. In addition, in regional development efforts, an emphasis is needed on the base sector which can provide a multiplier effect so as to improve people's welfare. This study aims to look at the relative level of distribution of economic activities in West Sumatra Province. The method used is to calculate the Localization Index. The data used is secondary data in the form of total GRDP based on current prices for each district/municipal, as well as GRDP per sector in each district/municipal. The sectors observed in this study are the manufacturing sector, the agriculture, forestry and fisheries sector as well as the wholesale and retail trade sector. The results of the analysis show that the relative distribution of economic activities in West Sumatra is evenly distributed and balanced between regions. The sector with the highest level of equity in economic activity is the wholesale and retail trade sector, followed by the manufacturing sector and the agriculture, forestry and fisheries sector.

Keywords: regional economy; area regional development; *Localization Index*

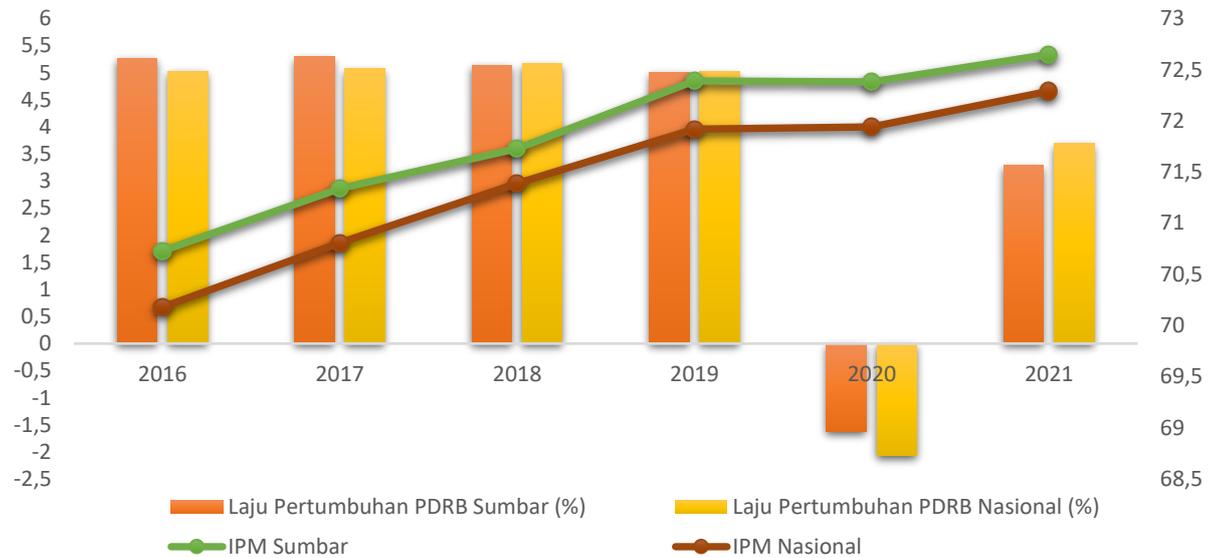
I. PENDAHULUAN

Pengembangan wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Fudge *et al.*, 2021), meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing wilayah (Kumari & Devadas, 2017) serta mengurangi ketimpangan wilayah (Bozhko, 2018). Pengembangan wilayah merupakan perubahan mendasar struktur sosial ekonomi masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan wilayah (Todaro & Smith, 2012). Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan wilayah serta peningkatan daya saing, maka pengembangan wilayah difokuskan kepada pengenalan terhadap potensi sumber daya lokal (Zasada *et al.*, 2018; Saragih, 2015) serta strategi pengembangan (Sumpeno, 2011). Penerapan konsep pengembangan wilayah disesuaikan dengan potensi dan permasalahan sehingga diperlukan strategi-strategi untuk percepatan pembangunan (Rustiadi *et al.*, 2018) yang sesuai dengan karakteristik dan tipologi wilayah masing-masing (Amelia *et al.*, 2022a; 2022b).

Salah satu upaya dalam rangka percepatan pembangunan wilayah adalah dengan merancang program-program yang terpadu dan bersinergi berdasarkan sumber daya wilayah (Saragih, 2015). Kebijakan dan strategi dalam mengembangkan wilayah yang disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan karakteristik wilayah diharapkan mampu memberikan efek pengganda yang akan mengurangi ketimpangan wilayah dan mengurangi tingkat kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Babkin *et al.*, 2017; Gugushvili *et al.*, 2017). Dalam rangka pengelolaan sumber daya lokal untuk meningkatkan ekonomi wilayah serta merangsang daya saing wilayah sangat diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat (Arsyad, 2016). Hal lain yang diperlukan dalam percepatan pengembangan wilayah adalah pengembangan sektor unggulan wilayah (Muta'ali, 2015). Pengembangan sektor-sektor unggulan di suatu wilayah merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan wilayah. Sektor-sektor unggulan yang akan dikembangkan adalah sektor yang mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta memberikan efek pengganda terhadap sektor lain dan wilayah (Muta'ali, 2015). Pengembangan sektor unggulan wilayah diharapkan akan mampu meningkatkan perekonomian wilayah dan mengurangi ketimpangan antar wilayah dengan terjadinya peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas serta menjadi prime mover perekonomian dan pengembangan wilayah.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi yang cukup besar diantara provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumbar yang berada di atas nilai IPM nasional dalam tujuh tahun terakhir. Nilai Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesejahteraan suatu wilayah. Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf serta standar hidup masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap hasil pembangunan untuk memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Selain nilai IPM indikator lain untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu wilayah adalah besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah yang timbul dari seluruh sektor-sektor perekonomian di suatu wilayah. Terdapat dua tipe PDRB yaitu berdasarkan harga berlaku dan berdasarkan harga konstan. PDRB berdasarkan harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung pada setiap tahun. PDRB berdasarkan harga konstan merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai harga dasar, dalam perhitungan terakhir menggunakan harga pada tahun 2010. Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi sumber daya yang cukup besar hal tersebut dapat dilihat dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan nilai Indeks Pembangunan Manusia (Gambar 1))

Laju Pertumbuhan PDRB dan IPM



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 1 Perbandingan laju pertumbuhan PDRB dan IPM Provinsi Sumbar dengan Nasional

Gambar 1 memperlihatkan laju pertumbuhan PDRB dan nilai IPM Provinsi Sumatera Barat dibandingkan dengan nasional. Laju pertumbuhan Provinsi Sumbar lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB nasional pada tahun 2016 sampai 2020. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan PDRB wilayah yang ada di Indonesia bernilai negatif, hal tersebut disebabkan pada tahun tersebut terjadi pandemi Covid 19 yang terjadi di seluruh dunia. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan PDRB Indonesia sebesar 3.69% lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumbar sebesar 3.29%. Nilai IPM Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan IPM nasional. Rata-rata selisih nilai IPM provinsi dengan nasional dari tahun 2016 sampai 2021 mencapai 0.45%.

Nilai IPM dan PDRB merupakan indikator yang untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah dalam mengembangkan wilayah dengan memanfaatkan potensi sumber daya daerah. Nilai PDRB juga dapat dijadikan sebagai indikator dalam membuat perencanaan, kebijakan dan strategi dalam pembangunan. Salah satu cara untuk mengetahui dan mengukur dinamika kegiatan ekonomi adalah dengan menghitung Indeks Lokasasi. Indeks lokasasi merupakan model yang digunakan untuk mengetahui tingkat penyebaran secara relatif suatu kegiatan ekonomi atau sektor di berbagai wilayah. Selain menggunakan PDRB model ini dalam penerapan lebih luas dapat juga menggunakan data struktur ketenagakerjaan, analisis subsektor, komoditas, penggunaan lahan dan lain sebagainya. Dalam rangka mewujudkan tujuan pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Barat diperlukan prioritas pengembangan sektor ekonomi yang menjadi *prime mover* perekonomian wilayah. Hal lain yang perlu dilakukan adalah dengan mengamati dinamika perekonomian dan tingkat penyebaran kegiatan perekonomian wilayah. Penelitian ini dilakukan untuk melihat tingkat penyebaran secara relatif kegiatan ekonomi atau sektor-sektor perekonomian di Provinsi Sumatera Barat.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpaduan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk melihat gambaran pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Barat. Metode kuantitatif dilakukan dengan mengkaji berbagai penelitian yang terkait dengan pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi dan indeks lokasasi wilayah. Informasi dan data yang dikumpulkan adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Provinsi Sumatera Barat. Data lain yang digunakan adalah PDRB sektor pertanian dan industri pengolahan. Data dan informasi yang dikumpulkan adalah besaran PDRB sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan juga nilai PDRB setiap kabupaten/kota dalam rupiah. Data dan informasi PDRB terdiri dari 3 sektor dan 19 kabupaten/kota. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu data provinsi dalam angka tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat. Alat analisis yang digunakan adalah analisis Indeks Lokasasi (*Localization Index*).

Analisis Indeks Lokasasi adalah model yang digunakan untuk melihat dan mengukur tingkat penyebaran relatif suatu kegiatan ekonomi atau sektor di suatu wilayah. Metode perhitungan Indeks Lokasasi dilakukan dengan melihat distribusi sebuah sektor untuk wilayah yang berbeda-beda dibandingkan dengan distribusi di seluruh wilayah yang lebih luas, dimana kedua variabel tersebut dinyatakan dalam bentuk persen. Untuk setiap wilayah akan dihitung perbedaan antar masing-masing persentasenya. Selain untuk melihat persebaran kegiatan ekonomi, Indeks Lokasasi juga digunakan untuk melihat sektor mana yang penting bagi wilayah dan tingkat penyebarannya.

Formula:

$$LI = \frac{\sum |Er/En - Eir/Ein|}{2}$$

Keterangan:

- LI* = *Localization Index*
- Eir* = nilai PDRB sektor di wilayah i
- Ein* = total nilai PDRB sektor
- Er* = nilai PDRB wilayah i
- En* = total nilai PDRB

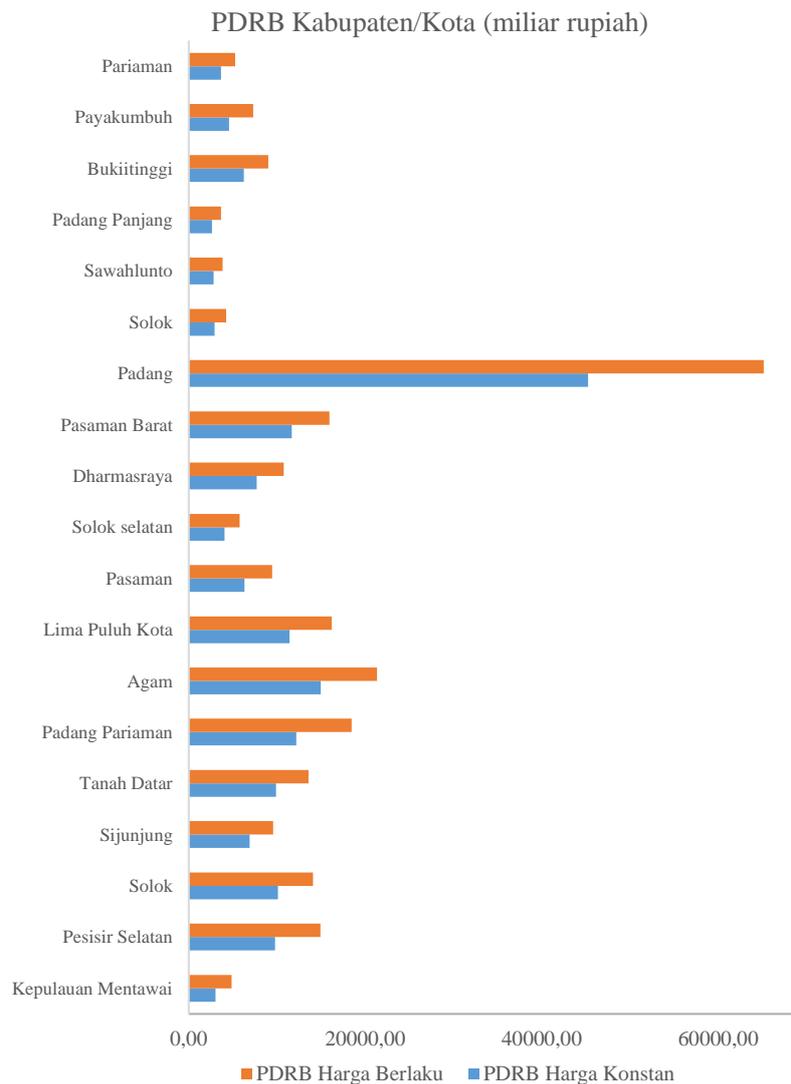
Selain menggunakan nilai PDRB, perhitungan Indeks Lokasasi (*Localization Index*) dapat juga dilakukan dengan menggunakan data jumlah tenaga kerja, luas lahan, jumlah produksi atau indikator perekonomian lainnya. Indeks Lokasasi jika dalam skala maksimal 1, maka nilai LI berkisar antara 0 – 1. Interpretasi nilai LI adalah jika nilai LI mendekati 0, maka tingkat distribusi atau penyebaran sektor relatif seimbang. Jika nilai LI mendekati 1, maka tingkat distribusi dan penyebaran sektor relatif tidak seimbang dan terkonsentrasi di beberapa wilayah tertentu.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu dari beberapa provinsi yang memiliki nilai IPM diatas nilai IPM Indonesia. Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi yang memiliki potensi sumber daya yang cukup besar. Potensi pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Barat yang mengalami kemajuan dan keberhasilan yang cukup besar dalam 5 tahun terakhir, hal tersebut dapat dijadikan modal yang kuat untuk mempercepat pembangunan Sumatera Barat di masa mendatang. Walaupun Sumatera Barat telah mencapai kemajuan dan keberhasilan, tetapi Sumatera Barat masih menghadapi

berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang harus ditangani melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan secara berkelanjutan.

Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah 42012.89 km² memiliki 12 kabupaten dan 7 kota dengan jumlah penduduk 5.58 juta penduduk pada tahun 2021. Dari seluruh wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Barat, kabupaten/kota yang memiliki nilai PDRB berdasarkan harga konstan 2010 dan harga berlaku yang tertinggi adalah Kota Padang (Gambar 2). Produk Domestik Regional Bruto merupakan kumulatif nilai tambah bruto dari seluruh lapangan usaha. Nilai PDRB memperlihatkan kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan barang dan jasa dari seluruh kegiatan ekonomi yang ada. Nilai Produk Domestik Regional Bruto merupakan cerminan perekonomian suatu wilayah, dimana PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi.



Sumber: Provinsi dalam angka 2022

Gambar 2 PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Harga Konstan 2010 dan Harga Berlaku

Gambar 2 memperlihatkan besaran PDRB kabupaten/kota berdasarkan harga konstan 2010 dan berdasarkan harga berlaku di Provinsi Sumatera Barat. Dari 19 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat, Kota Padang adalah wilayah dengan nilai PDRB tertinggi sebesar

45277.96 miliar rupiah (berdasarkan harga konstan 2010) atau sebesar 65179.47 miliar rupiah (berdasarkan harga berlaku), diikuti oleh Kabupaten Agam dengan PDRB berdasarkan harga berlaku sebesar 21347.40 miliar rupiah (Gambar 2). Kabupaten/kota dengan nilai PDRB terkecil adalah Kota Padang Panjang sebesar 3651.12 miliar rupiah (berdasarkan harga berlaku), diikuti oleh Kota Sawahlunto sebesar 3850.70 miliar rupiah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari besaran PDRB atas harga berlaku. Berdasarkan besaran PDRB tersebut dapat dilihat tingkat penyebaran secara relatif sektor-sektor ekonomi Provinsi Sumatera Barat, serta sektor yang potensial untuk dikembangkan dengan menggunakan metode *Localization Index* (LI). Dalam melihat tingkat penyebaran relatif, sektor-sektor yang diamati adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan besar dan eceran. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor yang mewakili pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, hal tersebut dapat dilihat dari besaran proporsi PDRB sektor berdasarkan total semua sektor di setiap kabupaten/kota.

Besaran PDRB sektor industri pengolahan diantara kabupaten/kota yang memiliki persentase terbesar adalah Kota Padang sebesar 35.15%, diikuti oleh Kabupaten Pasaman Barat sebesar 10.05% (Tabel 1). Wilayah dengan PDRB sektor industri terkecil adalah Kota Padang Panjang sebesar 0.14% dan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0.57%. Tingkat penyebaran secara relatif sektor industri pengolahan di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil perhitungan $LI = 38.16/2 = 19.08$. Jika diskalakan antara 0 – 1, maka nilai LI sektor industri pengolahan adalah 0.1980. Berdasarkan batasan tersebut, maka diinterpretasikan bahwa tingkat penyebaran sektor industri pengolahan di Provinsi Sumatera Barat relatif merata dan seimbang antar wilayah.

Tabel 1 *Localization Index* sektor industri pengolahan

No	Kabupaten/ Kota	Total PDRB (juta)		PDRB Sektor Industri Pengolahan (juta)		X-Y	X-Y (absolut)
		Rp	X (%)	Rp	Y (%)		
1	Kepulauan Mentawai	4843813.95	1.91	124608.72	0.57	1.34	1.34
2	Pesisir Selatan	14927572.58	5.89	1015111.12	4.65	1.24	1.24
3	Solok	14080297.4	5.56	677495.45	3.10	2.45	2.45
4	Sijunjung	9566572.91	3.78	261194.05	1.20	2.58	2.58
5	Tanah Datar	13567807.17	5.35	1458005.34	6.68	1.32	1.32
6	Padang Pariaman	18455088.03	7.28	2205039.82	10.10	2.82	2.82
7	Agam	21347404.82	8.42	2121662.93	9.72	1.29	1.29
8	Lima Puluh Kota	16193413.95	6.39	1050711.01	4.81	1.58	1.58
9	Pasaman	9433249.73	3.72	374998.76	1.72	2.01	2.01
10	Solok selatan	5777977.93	2.28	254405.07	1.17	1.12	1.12
11	Dharmasraya	10756664.96	4.25	576755.37	2.64	1.60	1.60
12	Pasaman Barat	15931875.79	6.29	2193427.88	10.05	3.76	3.76
13	Padang	65179471.01	25.72	7673879.73	35.15	9.43	9.43
14	Solok	4251892.56	1.68	183068.22	0.84	0.84	0.84

15	Sawahlunto	3850697.74	1.52	432174.39	1.98	0.46	0.46
16	Padang Panjang	3651118.22	1.44	30484.84	0.14	1.30	1.30
17	Bukiittinggi	9026564.58	3.56	461860.48	2.12	1.45	1.45
18	Payakumbuh	7290850.77	2.88	367277.74	1.68	1.20	1.20
19	Pariaman	5258657.03	2.08	370457.25	1.70	0.38	0.38
Jumlah		253390991.1		21832618.17			38.16

Besaran PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan diantara kabupaten/kota yang memiliki persentase terbesar adalah Kabupaten Pasaman Barat sebesar 11.34%, diikuti oleh Kabupaten Agam sebesar 11.17% (Tabel 2). Wilayah dengan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terkecil adalah Kota Bukittinggi sebesar 0.19% dan Kota Padang Panjang sebesar 0.33%. Tingkat penyebaran secara relatif sektor pertanian, kehutan dan perikanan di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil perhitungan $LI = 57.38/2 = 28.69$. Jika diskalakan antara 0 – 1, maka nilai LI sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah 0.2869. Berdasarkan batasan tersebut, maka diinterpretasikan bahwa tingkat penyebaran sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Provinsi Sumatera Barat relatif merata dan seimbang antar wilayah.

Tabel 2 *Localization Index* sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

No	Kabupaten/ Kota	Total PDRB (juta)		PDRB Sektor Pertanian (juta)		X-Y	X-Y (absolut)
		Rp	X (%)	Rp	Y (%)		
1	Kep. Mentawai	4843813.95	1.91	2366956.07	4.24	-2.33	2.33
2	Pesisir Selatan	14927572.58	5.89	5555919.97	9.95	-4.06	4.06
3	Solok	14080297.4	5.56	4713860.85	8.44	-2.88	2.88
4	Sijunjung	9566572.91	3.78	2626580.81	4.70	-0.93	0.93
5	Tanah Datar	13567807.17	5.35	3881483.11	6.95	-1.60	1.60
6	Padang Pariaman	18455088.03	7.28	4180128.23	7.49	-0.20	0.20
7	Agam	21347404.82	8.42	6237299.55	11.17	-2.75	2.75
8	Lima Puluh Kota	16193413.95	6.39	5219939.16	9.35	-2.96	2.96
9	Pasaman	9433249.73	3.72	4435901.16	7.94	-4.22	4.22
10	Solok selatan	5777977.93	2.28	1641940.54	2.94	-0.66	0.66
11	Dharmasraya	10756664.96	4.25	2957554.44	5.30	-1.05	1.05
12	Pasaman Barat	15931875.79	6.29	6333610.91	11.34	-5.05	5.05
13	Padang	65179471.01	25.72	3445829.45	6.17	19.55	19.55
14	Solok	4251892.56	1.68	221160.38	0.40	1.28	1.28
15	Sawahlunto	3850697.74	1.52	345211.69	0.62	0.90	0.90
16	Padang Panjang	3651118.22	1.44	186943.01	0.33	1.11	1.11
17	Bukiittinggi	9026564.58	3.56	104286.12	0.19	3.38	3.38
18	Payakumbuh	7290850.77	2.88	442230.91	0.79	2.09	2.09

19	Pariaman	5258657.03	2.08	943055.69	1.69	0.39	0.39
Jumlah		253390991.1		55839892.05			57.38

Besaran PDRB sektor perdagangan besar dan eceran diantara kabupaten/kota yang memiliki persentase terbesar adalah Kota Padang sebesar 27.09%, diikuti oleh Kabupaten Agam sebesar 10.22% (Tabel 3). Wilayah dengan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran terkecil adalah Kota Sawahlunto sebesar 1.42% dan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 1.55%. Tingkat penyebaran secara relatif sektor perdagangan besar dan eceran di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil perhitungan $LI = 20.87/2 = 10.44$. Jika diskalakan antara 0 – 1, maka nilai LI sektor perdagangan besar dan eceran adalah 0.1044. Berdasarkan batasan tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa tingkat penyebaran sektor perdagangan besar dan eceran di Provinsi Sumatera Barat relatif merata dan seimbang antar wilayah.

Tabel 3 *Localization Index* sektor perdagangan besar dan eceran

No	Kabupaten/ Kota	Total PDRB (juta)		PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (juta)		X-Y	X-Y (absolut)
		Rp	X (%)	Rp	Y (%)		
1	Kep. Mentawai	4843813.95	1.91	615900.52	1.55	0.36	0.36
2	Pesisir Selatan	14927572.58	5.89	1775204.98	4.47	1.42	1.42
3	Solok	14080297.4	5.56	1540707.66	3.88	1.68	1.68
4	Sijunjung	9566572.91	3.78	1116110.22	2.81	0.96	0.96
5	Tanah Datar	13567807.17	5.35	1779728.12	4.48	0.87	0.87
6	Padang Pariaman	18455088.03	7.28	1965312.79	4.95	2.33	2.33
7	Agam	21347404.82	8.42	4058606.76	10.22	-1.80	1.80
8	Lima Puluh Kota	16193413.95	6.39	2371561.79	5.97	0.42	0.42
9	Pasaman	9433249.73	3.72	1281980.02	3.23	0.49	0.49
10	Solok selatan	5777977.93	2.28	1160976.89	2.92	-0.64	0.64
11	Dharmasraya	10756664.96	4.25	1560824.47	3.93	0.31	0.31
12	Pasaman Barat	15931875.79	6.29	1949621.3	4.91	1.38	1.38
13	Padang	65179471.01	25.72	10756224.22	27.09	-1.36	1.36
14	Solok	4251892.56	1.68	1046395.93	2.64	-0.96	0.96
15	Sawahlunto	3850697.74	1.52	564865.95	1.42	0.10	0.10
16	Padang Panjang	3651118.22	1.44	639283.12	1.61	-0.17	0.17
17	Bukittinggi	9026564.58	3.56	2993968.47	7.54	-3.98	3.98
18	Payakumbuh	7290850.77	2.88	1750503.67	4.41	-1.53	1.53
19	Pariaman	5258657.03	2.08	783523.15	1.97	0.10	0.10
Jumlah		253390991.1		39711300.03			20.87

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Lokalisasi (*Localization Index*) dapat dilihat sektor industri pengolahan memiliki nilai LI sebesar 0.1980, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki nilai LI sebesar 0.2869 serta sektor perdagangan besar dan kecil

memiliki nilai LI sebesar 0.1044. Ketiga sektor ekonomi yang diamati tersebut memiliki nilai LI mendekati 0, artinya ketiga sektor pembangunan tersebut memiliki tingkat penyebaran relatif merata dan seimbang antar kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Penyebaran sektor-sektor perekonomian yang ada di Sumatera Barat merata, tidak terkonsentrasi hanya di beberapa wilayah saja.

Provinsi Sumatera Barat yang memiliki beragam potensi dan sumber daya (Murao, 2013; Asrina *et al.*, 2017) yang menjadi salah satu faktor yang membedakan dengan wilayah lainnya. Pengembangan wilayah Sumatera Barat dilakukan dengan memanfaatkan potensi wilayah yang dimiliki (Chulaphan & Barahona, 2018). Distribusi atau penyebaran kegiatan perekonomian yang merata di setiap wilayah yang ada di Sumatera Barat menjadi salah satu faktor yang mendukung pengembangan wilayah Sumatera Barat. Tingkat penyebaran secara relatif kegiatan-kegiatan perekonomian mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan (Zasada *et al.*, 2018). Pemerataan kegiatan ekonomi wilayah juga akan berpengaruh terhadap pengembangan wilayah dan mampu memperkecil ketimpangan wilayah (Rustiadi *et al.*, 2018). Ketimpangan antar wilayah di Provinsi Sumatera Barat tergolong kecil, hal tersebut dapat dilihat dari nilai LI. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat juga tidak mengalami fluktuasi, hal tersebut dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB yang cenderung stabil (Gambar 1).

IV. KESIMPULAN

Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi ketimpangan antar wilayah. Tujuan pembangunan dapat diwujudkan bila daerah mampu mengenali potensi wilayah yang mampu meningkatkan ekonomi dan pengembangan wilayah. Potensi-potensi wilayah tersebut diharapkan menjadi prime mover bagi pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah juga dapat terwujud bila semua kegiatan-kegiatan perekonomian terdistribusi merata untuk setiap wilayah.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kesejahteraan yang cukup tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari nilai IPM dan laju pertumbuhan PDRB. Nilai IPM Provinsi Sumatera Barat yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan memiliki nilai diatas nilai IPM nasional. Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat cenderung mengalami peningkatan dengan pertumbuhan yang stabil. Berdasarkan Localization Index tingkat penyebaran secara relatif kegiatan-kegiatan ekonomi (sektor) yang ada di Sumatera Barat cenderung terdistribusi merata. Dari tiga sektor perekonomian yang diamati, ketiganya memiliki tingkat penyebaran yang relatif merata dan seimbang antar wilayah. Sektor yang memiliki tingkat pemerataan yang paling tinggi adalah sektor perdagangan besar dan eceran, diikuti oleh sektor industri pengolahan dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Localization Index memperlihatkan terjadi pemerataan kegiatan-kegiatan perekonomian di seluruh wilayah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Pendistribusian kegiatan perekonomian yang merata tersebut akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mampu memperkecil ketimpangan antar wilayah. Hal tersebut juga akan berdampak terhadap peningkatan daya saing Provinsi Sumatera Barat dengan wilayah lainnya yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, S., Rustiadi, E., Barus, B., & Juanda, B. (2022a). Analisis Spasial Karakteristik Kawasan Strategis Ekonomi Koridor Barat-Timur dalam Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Barat. *Tataloka*, 24(2), 141–155.
<https://doi.org/10.14710/tataloka.24.2.141-155>
- Amelia, S., Rustiadi, E., Barus, B., & Juanda, B. (2022b). Mapping the Diversity of Regional Characteristics Towards Sustainable Economic Strategic Area Development: A Case Study of West-East Corridor of West Sumatra Province. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 17(1), 185–193.
<https://doi.org/10.18280/ijstdp.170118>
- Arsyad, L. (2016). *Ekonomi Pembangunan* (Lima). UPP STMIK YKPN.
- Asrina, M., Gunawan, A., & Aris, M. (2017). Identification of Minangkabau Landscape Characters. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 91(1).
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/91/1/012018>
- Babkin, A., Vertakova, Y., & Plotnikov, V. (2017). Study and assessment of clusters activity effect on regional economy. *SHS Web of Conferences*, 35, 01063.
<https://doi.org/10.1051/shsconf/20173501063>
- Bozhko, L. (2018). Development scenarios for the interregional economic interaction in the context of economy clustering in the Republic of Kazakhstan. *Energy Procedia*, 147, 397–401. <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2018.07.109>
- Chulaphan, W., & Barahona, J. F. (2018). Contribution of disaggregated tourism on Thailand's economic growth. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 39(2018), 401–406. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2017.07.012>
- Fudge, M., Ogier, E., & Alexander, K. A. (2021). Emerging functions of the wellbeing concept in regional development scholarship: A review. *Environmental Science and Policy*, 115(July 2020), 143–150.
<https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.10.005>
- Gugushvili, T., Salukvadze, G., & Salukvadze, J. (2017). Fragmented development: Tourism-driven economic changes in Kazbegi, Georgia. *Annals of Agrarian Science*. <https://doi.org/10.1016/j.aasci.2017.02.005>
- Kumari, R., & Devadas, V. (2017). Modelling the dynamics of economic development driven by agricultural growth in Patna Region, India. *Journal of Economic Structures*, 6(1). <https://doi.org/10.1186/s40008-017-0075-x>
- Murao, S. (2013). A Cultural Anthropological Study of Body Techniques for Protection: The Case Study of Indonesian Minangkabau. *Ars Vivendi Journal*, 3(3), 51–68.
- Muta'ali, L. (2015). *Teknik Analisis Regional untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan* (1st ed.). Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFGe) UGM.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2018). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah* (4th ed.). Yayasan Pustaka Obor.
- Saragih, J. R. (2015). *Perencanaan Wilayah dan Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, Teori dan Aplikasi* (1st ed.). Pustaka Pelajar.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu* (kedua). Read.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic development* (11th ed). Addison-Wesley.
- Zasada, I., Weltin, M., Reutter, M., Verburg, P. H., & Pierr, A. (2018). EU's rural development policy at the regional level—Are expenditures for natural capital linked with territorial needs? *Land Use Policy*.
<https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.05.053>